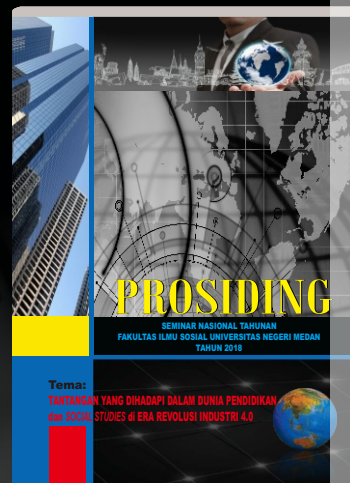


# PROSIDING



<http://semnasfis.unimed.ac.id>



**PROSIDING**  
SEMINAR NASIONAL TAHUNAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
TAHUN 2018

**Tema:**  
**TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM DUNIA PENDIDIKAN**  
**dan SOCIAL STUDIES di ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**



9 772548 435001

DIGITAL LIBRARY  
Universitas Negeri Medan

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL TAHUNAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2018

Tema: Tantangan Yang dihadapi Dalam Dunia Pendidikan  
dan Social Studies di Era Revolusi Industri 4.0

Vol. 2, Tahun 2018

p-ISSN 2549-435X



# PROSIDING

SEMINAR NASIONAL TAHUNAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
TAHUN 2018

**Tema:**  
**TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM DUNIA PENDIDIKAN**  
**dan SOCIAL STUDIES di ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**





## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga tim penyusun dapat menyelesaikan prosiding seminar nasional sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Prosiding ini merupakan hasil dari kegiatan seminar nasional tahunan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Seminar nasional tahun 2018 mengangkat tema tentang : “Tantangan Yang Dihadapi Dalam Dunia Pendidikan Dan *Social Studies* Di Era Revolusi Industri 4.0” dengan sub-sub tema yang meliputi : (1) Tantangan Yang Dihadapi Dalam Dunia Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0; (2) Inovasi Pembelajaran Di Era Revolusi Industri 4.0; (3) Strategi Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Menghadapi Revolusi Industri 4.0; (4) Pembelajaran Karakter Berbasis IT; (5) Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal Di Era Revolusi Industri 4.0; (6) Peningkatan Kompetensi Guru Di Era Revolusi Industri 4.0; (7) Pembelajaran Berbasis Tanggap Bencana; (8) Pembelajaran Sejarah Berbasis Internet.

Di era revolusi industri 4.0 yang penuh dengan perubahan dan tuntutan, mengharuskan lembaga pendidikan dapat merespon dan melakukan inovasi secara komprehensif terhadap kurikulum dengan segala perangkat pembelajarannya. Untuk itu, diharapkan melalui kegiatan seminar nasional ini dapat diperoleh ide-ide dan gagasan-gagasan baik dari para narasumber maupun dari peserta yang terdokumentasi dalam bentuk prosiding seminar nasional. Kehadiran prosiding ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi para pembaca, khususnya bagi para akademisi dan guru dalam meningkatkan kompetensi di era revolusi industri 4.0.

Tim penyusun menyadari bahwa prosiding dari hasil seminar ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, tim penyusun mengharapkan kritik dan saran membangun dari pembaca yang budiman untuk kesempurnaan prosiding ini. Akhir kata, disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan masukannya hingga terselesaikannya prosiding ini.

Medan, Desember 2018  
Dekan FIS UNIMED

Dra. Nurmala Berutu, M.Pd

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY

|                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pola Konflik Tanah Pantai Timur Sumatera<br><b>Tappil Rambe</b> .....                                                                                                                                                                             | 512 – 515 |
| Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan<br><b>Bakhrul Khair Amal</b> .....                                                                                                                                            | 516 - 518 |
| Ragam Paradigma Penelitian Sosial<br><b>Hidayat</b> .....                                                                                                                                                                                         | 519 - 524 |
| Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal<br><b>Nurjannah</b> .....                                                                                                                                                                                      | 525 - 527 |
| Penyebab Terjadinya Kerusakan Pantai Ditinjau dari Aspek UU No. 32 Tahun 2009<br>tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<br><b>Yusna Melianti</b> .....                                                                             | 528 - 533 |
| Peranan Teungku Chik di Waido Ulama Ahli Meugoe<br>(Kajian Historis, Edukasi, Pertanian dan Kontribusinya pada Masyarakat Pidie Kekinian)<br><b>Usman</b> .....                                                                                   | 534 - 540 |
| Relasi Elit dengan Rakyat Kaitannya dengan Masa Depan Ideologi Negara<br><b>Tm. Jamil &amp; Maimun</b> .....                                                                                                                                      | 541 - 544 |
| Analisis Kesiapan Guru Kelas dalam Implementasi Penilaian Autentik Berbasis Karakter<br>di SD Negeri Kabupaten Dairi<br><b>Citra Magdalena Butarbutar</b> .....                                                                                   | 545 - 550 |
| Pengembangan Modul Pendidikan Kewarganegaraan Berorientasi pada Pembelajaran Inkuiri Terbimbing<br>untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Negeri 030293 Laehole Dairi<br><b>Yanti Rosdiana Berutu</b> .....                            | 551 - 555 |
| Buruh Harian Perempuan di Perkebunan Kelapa Sawit Desa Bandar Perbaungan<br><b>Lukitaningsih &amp; Syarifah</b> .....                                                                                                                             | 556 - 558 |
| Pengembangan Media Pembelajaran Sejarah Berbasis IT<br><b>Irfa Aulaini Damanik</b> .....                                                                                                                                                          | 559 - 561 |
| Pengaruh Metode Wayang terhadap Hasil dan Motivasi Siswa pada Pembelajaran PKn Indahnya Keragaman<br>Di Negeriku Tema 7 Kelas IV SD Negeri 067243 Kec. Medan Selayang Tahun Pelajaran 2018/2019<br><b>Ifran Fredy Tarigan, Dkk</b> .....          | 562 - 564 |
| Blended Learning, Solusi Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0<br><b>Joy Prima Siahaan</b> .....                                                                                                                                              | 565 - 567 |
| Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS dengan Menggunakan Model Kooperatif<br>Tipe <i>Snowball Throwing</i> di Kelas IV SDN Inpres No. 064022 Simalingkar B Medan Tahun Ajaran 2018/2019<br><b>Fauziah Nasution</b> ..... | 568 - 571 |
| Pengaruh Pendekatan Kontesktual pada Materi Pemilu Mata Pelajaran PKn Kelas VI Kec. Percut Sei Tuan<br><b>Luciana Simanjuntak</b> .....                                                                                                           | 572 - 573 |
| Perbedaan Model <i>Contextual Teaching And Learning</i> Dengan Model Pembelajaran Konvensional terhadap<br>Hasil Belajar PKn Siswa Kelas IV SD Negeri 102083 Pabatu<br><b>Maria Melfa Simanjuntak</b> .....                                       | 574 - 577 |
| Revolusi Industri 4.0 dan Pengaruhnya terhadap Peran Pendidik di Abad 21 dalam Dunia Pendidikan<br><b>Masleni Harahap</b> .....                                                                                                                   | 578 - 580 |

## FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

**Bakhrul Khair Amal**

Dosen Prodi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Corresponding author :

### Abstrak

Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kaitan pendidikan dengan komponen sosial yang lain. Oleh karena itu, seperti halnya analisis kebijakan dalam bidang lain, sifat kontekstual dan interdisipliner ini merupakan ciri analisis kebijakan pendidikan. Analisis kebijakan merupakan usaha untuk menghasilkan dan mengolah informasi (yang relevan) dengan menggunakan ilmu sosial terapan. Untuk memecahkan masalah pendidikan dalam situasi politik tertentu ini dilakukan dengan metode inquiri (methods of inquiry) dan argumen ganda.

**Kata Kunci :** Kebijakan Pendidikan, Metode Inquiri, Argumen Ganda

### PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sebagai salah satu sektor pembangunan yang pokok, dimana pemerintah di setiap negara harus benar-benar memperhatikan sektor ini agar seimbang bersama-sama dengan sektor pembangunan lainnya. Sebegitu pentingnya perhatian kepada sektor pendidikan dalam pembangunan tidak lain karena pendidikan menyediakan sumber daya manusia yang akan turut andil dalam kelancaran pembangunan nasional pada suatu negara. Karena pendidikan sangat penting maka pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak dari setiap warga negara. Meletakkan pendidikan sebagai hak, memberikan sebuah beban bagi pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi penerima hak. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu memposisikan pendidikan sebagai sebuah kebutuhan.

Dalam kaitannya antara kebijakan dengan pendidikan, menurut Rohman (2009) istilah kebijakan dalam dunia pendidikan sering disebut dengan istilah perencanaan pendidikan (educational planning), rencana induk tentang pendidikan (master plan of education), pengaturan pendidikan (educational regulation), kebijakan tentang pendidikan (policy of education). namun istilah-istilah tersebut itu sebenarnya memiliki perbedaan isi dan cakupan makna dari masing-masing yang ditunjukkan oleh istilah tersebut.

### PEMBAHASAN

#### Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan

Ilmu kebijakan (*policy science*) menurut Lasswell (Dunn, 1981) menyatakan bahwa ilmu kebijakan tidak hanya semata-mata ilmu, tetapi juga secara fundamental berorientasi praktis. Tujuan ilmu kebijakan bukan hanya membantu membuat keputusan yang efisien, tetapi juga menyumbang perbaikan praktek demokrasi, yang pada gilirannya nanti akan membantu merealisasikan sepenuhnya harga diri manusia (*human dignity*). Dalam hubungan ini ilmu dipakai sebagai alat kemajuan manusia sekaligus juga mempunyai komitmen terhadap nilai yang diyakini manusia itu sendiri.

Kebijakan dalam hal ini harus dapat membantu merealisasikan kebutuhan manusia, yang antara lain meliputi: (a) kekuasaan (*power*) yaitu keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, (b) pencerahan dari kebodohan (*enlightenment*) yaitu pemahaman, pengetahuan informasi, (c) kekayaan (*wealth*) yaitu penghasilan dan hak milik, (d) kesejahteraan (*well-being*) yaitu kesehatan, rasa aman, kenyamanan dan keselamatan, (e) keterampilan (*skill*) yaitu kemahiran dalam melaksanakan tugas, (f) perasaan kasih sayang (*affection*) yaitu cinta, persahabatan, kesetiaan dan solidaritas, (g) penghargaan (*respect*) yaitu kehormatan, status, reputasi dan nondiskrimasi, (h) kejujuran (*rectitude*) yaitu kecocokan dengan standar etik dan keagamaan.

Dalam menetapkan kebijakan tersebut perlu diperhatikan bahwa kebijakan itu menjangkau masa depan. Oleh karena itu pelaku kebijakan seringkali belum ada pada saat kebijakan ditetapkan. Hal ini menyebabkan kemungkinan tidak tepatnya kebijakan itu sendiri, karena antisipasi yang belum jelas tentang pengaruh timbal balik antara pelaku dan lingkungannya.

Dalam kaitannya dengan pendidikan, Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kaitan pendidikan dengan komponen sosial yang lain. Oleh karena itu, seperti halnya analisis kebijakan dalam bidang lain, sifat kontekstual dan interdisipliner ini merupakan ciri analisis kebijakan pendidikan. Analisis kebijakan merupakan usaha untuk menghasilkan dan mengolah informasi (yang relevan) dengan menggunakan ilmu sosial terapan. Untuk memecahkan masalah pendidikan dalam situasi politik tertentu ini dilakukan dengan metode inquiri (methods of inquiry) dan argumen ganda. Oleh karena itu analisis kebijakan pendidikan adalah usaha dengan ciri yang disebutkan diatas yang diterapkan dalam bidang pendidikan.

Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Menurut Edwards III dalam Tilaar (2012), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

## 1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

- Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi implementasi tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi kebijakan, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
- Sumber daya  
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

## 2. Sumber Daya

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung keputusan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan di lapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana di lapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

## 3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika

implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan, kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

#### SIMPULAN

Kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional, yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai. Faktor – faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan dalam bidang pendidikan tersebut adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

#### REFERENSI

- Dunn, W.N. (1981). *Public Policy Analysis: An Introduction*. New York: Prentice-Hall
- H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho (2012). *Kebijakan Pendidikan, Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Imron, Ali (2008). *Kebijakan Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rohman, Arif (2009). Kebijakan Pendidikan: pengertian Kebijakan Pendidikan. Available At: <https://www.kajianmakalah.com/2013/03/kebijakan-pendidikan-pengertian-kebijakan-pendidikan.html>. Akses: 20 April 2018
- Solichin, Abdul Wahab (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Solichin, Mujianto (2015) *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PERAN BIROKRASI*. Religi: Jurnal Studi Islam Volume 6, Nomor 2, Oktober 2015